

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam dua dekade terakhir pasca-reformasi, konsolidasi demokrasi di Indonesia memiliki wujud dan pengaruh yang paradoksal pada masyarakat dan negara. Betapa pun luasnya kebebasan dan desentralisasi kuasa yang dinikmati pada era ini, reformasi tetap tidak dapat menghalangi lapisan oligark lama, yang berkembang di era Soeharto, untuk kembali berkuasa (Robison dan Hadiz, 2004). Sebagai konsekuensinya, sekalipun upaya untuk merakit dan memperkuat demokrasi sedang dilakukan, kuasa oligark justru dapat mengancam proses demokratisasi di Indonesia dan mengembalikan tatanan politik yang korup dan menyempitkan ruang partisipasi politik seperti Orde Baru. Terbukti, sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak kajian, proses konsolidasi demokrasi kita justru turut menebarkan dan melanggengkan nilai-nilai dan tatanan partikularistik serta otoritarian (lihat Hanif dan Pratikno, 2012; Heryanto dan Hadiz, 2005; Jeffrey A. Winters, 2013). Dalam hal ini, norma-norma pluralisme berpotensi menjadi, dalam ungkapan Bell et al. (1995), “subordinat dihadapan nilai-nilai familisme dan harmoni”.

Kini persoalan pada demokrasi di Indonesia justru berkembang lebih jauh lagi. Sejumlah kajian terbaru secara konsensual menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia kini mengalami regresi demokratik, berbelok ke arah yang lebih konservatif (Bourchier, 2019; Diprose, McRae, dan Hadiz, 2019) dan memuat elemen kunci fasisme, nasionalisme keras (lihat persyaratan minimal sebuah negara fasis di Suvin, 2017). Belokan ini ditandai oleh dua elemen penting, yakni adanya ancaman dari aktor politik yang mengadopsi otoritarianisme (Power, 2018), dan menguatnya nasionalisme keras yang berdifusi dengan kelompok Islam di masyarakat.

Perkembangan nasionalisme di Indonesia dapat diargumentasikan berimplikasi pada cara kontrol sosial sekaligus mempertahankan kepentingan elit-elit

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

politik; nasionalisme menjadi nilai serta norma umum yang mengatur tata perilaku bahkan kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan stigma separatis pada gerakan Papua merdeka<sup>1</sup>, di mana partisipan dalam gerakan itu dituduh separatis sehingga dianggap menyimpang dan layak mendapatkan diskriminasi.

Gerakan Papua merdeka muncul sebagai reaksi orang-orang Papua terhadap penindasan negara pada akhir masa pemerintahan Soekarno (lihat Viartasiwi, 2018). Sejak pertengahan 1960an hingga awal 1980an, serangan bom melalui udara dan darat menjadi salah satu cara pemerintah Indonesia untuk meredam upaya memerdekakan diri di Papua Barat (Gault-Williams, 1987).

Salah satu catatan dramatis dalam sejarah gerakan ini adalah pesan dari Pendeta Origines Hokojoju kepada Henk Joku tentang bagaimana kebrutalan militer, yakni Jenderal Ali Murtopo, pada representatif dari *Act of Free Choice* (AFC) pada tahun 1969. Ali Murtopo, menurut Hokojoju, mengatakan kepada peserta AFC:

Kalau kalian mau merdeka sebaiknya kalian minta Tuhan kalau Dia bisa berbaik hati untuk mengangkat sebuah pulau di tengah Lautan Pasifik sehingga kalian bisa bermigrasi ke sana. Kalian juga bisa menulis surat pada orang-orang Amerika. Mereka sudah menapakkan kaki di Bulan, mungkin mereka akan mau mendirikan sebuah tempat untuk kalian di sana. Di antara kalian yang berpikiran voting melawan Indonesia harus berpikir ulang, karena kalau kalian melakukannya, kemarahan orang-orang Indonesia akan pada kalian. Lidah-lidah terkutuk kalian akan dipotong dan mulut-mulut jahat kalian akan disobek. Lalu saya, Jenderal Ali Murtopo, akan datang dan menembak kalian di tempat. (Gault-Williams, 1987)

Berbeda dari cara lama, kekerasan yang dialami oleh gerakan ini telah menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan anti-

---

<sup>1</sup> Istilah gerakan Papua merdeka sering disamaartikan dengan Organisasi Papua Merdeka. Bagaimanapun juga studi ini membedakannya berdasarkan konseptualisasi dalam literatur gerakan sosial. Yang pertama adalah salah satu bentuk gerakan sosial yang melawan narasi sejarah Indonesia dan menuntut dilaksanakannya Hak Menentukan Nasib Sendiri, sedangkan yang kedua lebih tepat dipahami sebagai Organisasi Gerakan Sosial (*Social Movement Organization*, SMO).

kekerasan sampai batas tertentu. Kebanyakan penolakan terhadap gerakan ini pada masa pasca-reformasi datang dari kelompok-kelompok yang mempresentasikan dirinya sebagai martir keutuhan negara Indonesia dan negara<sup>2</sup> melalui stigmatisasi separatis. Stigma inilah yang mengakibatkan para aktivis mengalami diskriminasi dan pembatasan. Sebagai contoh, dalam cara yang lebih formal, negara telah membatasi akses media internasional dan pegiat Hak Asasi Manusia untuk menulis serta mengabarkan konflik di Papua Barat, mengembangkan apa yang Tapsell (2015) sebagai *regional sub-authoritarianism*. Pembatasan semacam ini tidak dianggap masalah oleh kebanyakan orang, sebagaimana tidak ada berita tentang penolakan yang berarti terhadap praktik otoritarian ini. Dapat diargumenkan ini terjadi karena banyak orang menganggapnya sebagai cara yang tepat untuk menghambat separatisme.

Penggunaan stigma separatis untuk mengontrol gerakan Papua merdeka mengantarkan saya pada permasalahan penting tentang identitas pada gerakan sosial. Bagaimana kontrol sosial yang dilakukan oleh negara dan organisasi lainnya melalui stigma mengonstruksi identitas kolektif? Dan sebagai konsekuensinya—sejak identitas berkaitan dengan kesadaran gerakan terhadap konteks, batasan, dan keanggotaan—bagaimana dinamika gerakan setelah distigmatisasi?

Konseptualisasi stigma sebagai kontrol sosial formal masih baru, oleh karenanya sedikit kajian yang menjelaskan fungsi politik dari stigma. Sejumlah kajian mengenai identitas kolektif telah mempelajari beragam cara identitas gerakan dibentuk di antaranya oleh mekanisme politik (misalnya Shriver dan Adams, 2013), emosi (misalnya Russo, 2014), tindakan (misalnya Gawerc, 2016), dan tempat (misalnya Yuen, 2018). Sebagai cara untuk menundukkan oposisi melalui pelabelan dan stereotipe, dapat diargumenkan bahwa stigma juga dapat

---

<sup>2</sup> Terdapat spekulasi bahwa kelompok ultra-nasionalis memiliki hubungan mutualistik dengan aktor negara. Pengelaborasi lebih lanjut mengenai ini dapat dilihat pada pekerjaan Haripin (2019), *In the Making of Democracy: The Military and Civil Society in Post-Authoritarian Indonesia*

menyebabkan konflik gerakan yang akibatnya menegosiasikan identitas kolektif. Namun faktanya implikasi stigma terhadap identitas gerakan masih sedikit dibahas.

## 1.2 Fokus Studi

Studi ini dimaksudkan untuk menemukan pola perilaku gerakan sosial dalam masa stigmatisasi politik. Lebih spesifiknya, studi ini mempelajari pola perilaku Aliansi Mahasiswa Papua, sebuah organisasi gerakan sosial, dalam menghadapi penolakan sosial dan politik di Indonesia. Dalam studi ini peneliti bersikap terbuka pada pola perilaku apapun yang ada di antara para partisipan. Jadi, alih-alih diawali dengan pertanyaan penelitian, studi ini menemukan pertanyaan penelitian berdasarkan data yang ada di area substantif lalu mempelajari konsep-konsep yang *grounded* di data.

## 1.3 Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Studi ini dilakukan karena minimnya kajian gerakan sosial yang menggunakan metodologi *grounded theory* (Mattoni, 2014). Selain itu, tak banyak juga studi gerakan sosial yang mengikutsertakan stigma dalam analisisnya. Kajian mengenai stigma dalam gerakan sosial telah dilakukan namun mereka memosisikan stigma sebagai masalah yang diprotes alih-alih sebagai situasi di mana aktor kolektif hidup (misalnya MacGregor, 2019). Sebagian kecil studi memosisikan stigma sebagai alat fungsional dalam politik, contohnya sebagai bagian dari mekanisme represi (misalnya Boykoff, 2007; Linden dan Klandermans, 2006), dan alat untuk melawan oposisi (misalnya Molek-Kozakowska dan Wanke, 2019).

Di Indonesia, gerakan pemisahan diri yang dilakukan oleh orang-orang Papua distigma. Itu artinya, kelompok dan organisasi yang mendukung kemerdekaan Papua sangat menjanjikan untuk dipelajari secara sosiologis. Namun, belum banyak studi yang mempelajari isu politik Papua-Indonesia ini sebagai

sebuah isu gerakan sosial dalam situasi penuh penolakan sosial. Karenanya, studi ini menjadi salah satu studi awal yang menjelajahi isu dan pola gerakan Papua merdeka di Indonesia.

Studi ini menunjukkan bagaimana penolakan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan pada masing-masing aktor gerakan Papua merdeka dalam beragam cara. Dengan kata lain, kajian mengenai stigma politik ini membuka pintu baru bagi pemerintah dan ornop (organisasi non pemerintah) untuk melihat dampak-dampak substil dan signifikan pada stigmatisasi separatis gerakan Papua merdeka.

Studi ini juga menunjukkan bagaimana aktivis Papua merespon lingkungan sosial yang menolak keberadaan mereka. Karenanya, studi ini dapat menginformasikan para aktivis tentang cara-cara yang tepat untuk menyikapi gerakan Papua yang mendukung kemerdekaan. Aktivis dapat menghindari dirinya dari memperdalam masalah yang ada dan mengarahkan kerja samanya dengan orang Papua ke arah yang lebih baik.

## **1.4 Tinjauan Literatur**

Kebanyakan studi gerakan sosial gagal untuk mengikutsertakan stigma sebagai konsep politis dan oleh karenanya mengubah kehidupan aktor kolektif secara signifikan. Untuk memperluas kajian gerakan sosial, saya mengambil pekerjaan terbaru dalam kajian stigma lalu menautkannya dengan identitas kolektif. Bagian ini menjelaskan kecenderungan kajian formasi identitas kolektif, serta fungsi politik dari stigma.

### **1.4.1 Teori Identitas Kolektif dalam Studi Gerakan Sosial**

Bagaimana cara sosiolog memahami gerakan sosial? Alberto Melucci (1995) berargumen tindakan kolektif perlu dipandang sebagai hasil dari proses-proses sebelumnya alih-alih permulaan, sehingga sosiolog secara khusus perlu

mempelajari proses-proses itu: bagaimana gerakan dibentuk dan memiliki berkelanjutan. Dalam hal ini, perhatian yang serius perlu diberikan pada segala upaya penyatuan tujuan, pemahaman, dan rasa; pendeknya, studi mengenai identitas kolektif menjadi penting di sosiologi untuk memahami kemunculan dan dinamika gerakan. Seperti yang telah Gamson (1991) tekankan, penyatuan diri dan hubungan di dalam gerakan merupakan tugas krusial untuk menjaga komitmen dan keberlanjutannya, dan konsep identitas kolektif membantu para *scholar* untuk menjelaskannya (untuk diskusi lebih lanjut lihat Flesher Fominaya, 2010, 2019; Polletta dan Jasper, 2001; Rohlinger dan Gentile, 2017).

Perhatian pada identitas kolektif merupakan respon para sosiolog pada kerangka teori dominan, yaitu mobilisasi sumber daya dan proses politik (sebelumnya dikenal sebagai oportunitas politik). Sekalipun teori-teori itu mampu menunjukkan bagaimana gerakan sosial diorganisasikan dalam beragam cara, dan bagaimana rejim politik dapat dikaitkan dengan kesuksesan gerakan, pertanyaan-pertanyaan yang lebih fundamental tentang dan kaitannya dengan nilai-nilai budaya terabaikan dan masih belum dijawab (Polletta dan Jasper, 2001). Sebagai respon atas banyaknya studi yang menjadikan negara sebagai fokus tindakan kolektif dan mencitra gerakan sebagai entitas rasional, sosiolog dan banyak akademisi telah mengambil jalan baru yang disebut sebagai ‘belokan kebudayaan’ (*cultural turn*) di mana bingkai, emosi, dan identitas kolektif dipertimbangkan sebagai elemen penting dalam gerakan. Terlepas dari belokan itu, identitas kolektif dianggap sebagai elemen kunci dalam banyak konseptualisasi gerakan sosial (Flesher Fominaya, 2019).

Ketertarikan para akademisi pada identitas kolektif disebabkan oleh kemampuannya dalam menjawab paling tidak empat pertanyaan penting (Polletta dan Jasper, 2001). Pertama, tentang kenapa orang-orang melebur dalam suatu kolektivitas lalu berperan sebagai aktor-aktor kolektif. Teori mobilisasi sumber daya dan proses politik tidak mampu menjawab hal ini karena mereka berfokus pada pengorganisasian kolektivitas itu dan bagaimana ia berhubungan dengan lembaga politik formal. Kedua, berkaitan dengan motivasi seseorang untuk

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

berpartisipasi dalam gerakan yang dijawab pada pertengahan tahun 1960an dijawab dengan selektif insentif (yaitu keuntungan individual), memotret partisipan sebagai makhluk (yang sangat) rasional. Kerangka teoritik yang rasionalistik ini gagal melihat gerakan juga memuat elemen-elemen yang non-rasional yang mana mampu merekrut orang-orang baru melalui kenikmatan, kegairahan, dan kewajiban tanpa insentif maupun kekerasan. Ketiga, pertanyaan tentang pemilihan keputusan dalam gerakan seperti strategi dan taktik. Penjelasan bahwa pilihan dan preferensi seseorang untuk berpartisipasi dalam model gerakan tertentu (misalnya, gerakan damai daripada kekerasan) semata-mata karena refleksi pada siapa dirinya jelaslah mengabaikan pilihan kolektif dari gerakan itu, oleh karenanya problematik. Model gerakan yang dipilih merupakan hasil dari proses antaraktor tindakan kolektif sehingga dapat diargumenkan bahwa pilihan partisipan juga dipengaruhi oleh identitas kolektif gerakannya. Terakhir, tentang bagaimana gerakan sosial dapat memengaruhi, melampaui ajuan teori mobilisasi sumber daya dan proses politik, hal-hal di luar negara dan reformasi. Itu artinya identitas kolektif sangat penting, tidak hanya dalam hal kemunculan dan keberlanjutan, juga dalam hal kesuksesan gerakan sosial.

Memahami konsep identitas kolektif, bagaimanapun juga, tidak semudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas karena tidak memiliki definisi konsensual. Sebagai contoh, Polletta dan Jasper (2001) mendefinisikannya sebagai koneksi individu dengan komunitas, atau praktik yang lebih luas, sedangkan Snow (2001) memosisikannya sebagai kepemilikan bersama dan berkaitan dengan agensi kolektif. Taylor dan Whittier (1992) mendefinisikan identitas kolektif sebagai definisi bersama tentang kelompok yang berangkat dari kepentingan, pengalaman, dan solidaritas bersama para anggota. Menjawab perdebatan tentang individual dan kolektif, Flesher Fominaya (2019) berargumen bahwa identitas kolektif merupakan keduanya pada saat yang bersamaan; ia tidak ada kecuali setiap anggota dalam gerakan itu menganutnya, sekaligus ia tak dapat dikonstruksi, dipertahankan maupun dikembangkan sepanjang waktu kalau tidak dimanifestasikan melalui tindakan dan interaksi sosial di dalam kolektivitas.

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Ada dua permasalahan yang akan muncul jika melokasikan identitas kolektif hanya dalam konsepsi diri individu. Pertama, jika konsepsi individu yang ditelusuri tidak terhubung dengan kolektivitas maka identitas kolektif gagal dipelajari. Kedua, definisi individu atas aktivismenya bisa saja berbeda-beda dan tidak tetap sehingga studi gagal mempelajari dinamika gerakan.

Menurut Flesher Fominaya (2010, 2019) teoritisasi identitas kolektif yang dibuat oleh Melucci (1995), akademisi yang membawa identitas kolektif ke dalam analisis ‘gerakan sosial baru’, lebih sistematis dan komprehensif dibandingkan dengan teoritisasi lainnya. Melucci membangun argumen teoritisasinya pada periode di mana gerakan sosial berbasis kelas mulai menurun, dan gerakan sosial berbasis lingkungan, kedamaian, feminis, dan semacamnya (yang biasanya disebut ‘*new social movements*’) mulai meningkat. Dia menolak ide bahwa identitas kolektif ada dan diterima begitu saja (*given*), dan mengajukan perlunya mempelajari bagaimana tindakan kolektif bisa muncul dan bertahan dalam suatu periode. Sebagai proses, identitas kolektif melibatkan definisi kognitif tentang tujuan, sarana dan bidang tindakan melalui penggunaan bahasa dan dilakukan melalui serangkaian ritual, praktik, dan artefak kebudayaan. Bagi Melucci, identitas kolektif mengacu pada jejaring hubungan dan dia menekankan pentingnya keterlibatan emosi dari para aktivis. Sebuah gerakan menyadari dirinya melalui pemahaman reflektif dalam kaitannya dengan konteks atau lingkungan di mana ia hadir, dan oleh karenanya konflik menyediakan dasar untuk mengkonsolidasikan identitas kelompok. Peran konflik, alih-alih pemahaman konsensual, nampak kontradiktif namun ia sangat krusial dalam *nature* proses konstruksi identitas kolektif. Melalui identitas kolektif, gerakan sosial membedakan dirinya dari yang ‘lain’, dan yang ‘lain’ mengakui gerakan itu. Identitas kolektif oleh karenanya tidak hanya meregulasikan keanggotaan dan mendefinisikan syarat-syarat untuk mengikuti aksinya tetapi juga menentukan keputusan-keputusan gerakan yang sah, dan bagaimana gerakan direpresentasikan kepada publik.

Teoritisasi Melucci ini menjembatani jarak antara makna dan kepercayaan setiap anggota, dan tindakan kolektif melalui penelusuran proses dinamik di mana

aktor-aktor menegosiasikan, memahami, dan mengonstruksi tindakan mereka melalui interaksi bersama yang terjadi berkali-kali. Formulasi teoritik ini kemudian dikembangkan oleh teoritis lainnya yang menganalisis formasi identitas kolektif di dalam gerakan sosial, yaitu tentang bagaimana semua kebersamaan itu dikonstruksi.

#### 1.4.2 Formasi Identitas Kolektif

Banyak peneliti telah menunjukkan beragam cara dalam membangun identitas gerakan, di antaranya melalui peran emosi (misalnya Fominaya, 2007; Russo, 2014), dan konteks serta *political field* (misalnya Barr dan Drury, 2009; Shriver dan Adams, 2013; Van Dyke dan Cress, 2006). Russo (2014) mempelajari peran pengalaman dan emosi dalam pembentukan identitas kolektif pada *Migrant Trail*, sebuah protes tahunan yang memprotes kematian migran. Dia menemukan bahwa pengalaman dan emosi melampaui jarak sosial, dan persoalan kredibilitas yang ada di antara gerakan yang beraliansi. Fominaya (2007) juga menemukan hal yang serupa dengan mempelajari peran humor dalam proses pembentukan identitas kelompok anti-kapitalis otonom.

Penelitian lainnya juga telah menunjukkan cara-cara di mana identitas kolektif dinegosiasikan dalam wilayah ekonomi dan politik yang lebih luas. Misalnya van Dyke dan Cress (2006) menjelajahi bagaimana konteks sosial-politik memengaruhi identitas kolektif gender dan mendemonstrasikan perubahan identitas gender pada masing-masing partisipan gerakan. Barr dan Drury (2009) mempelajari protes-protes G8 dalam menegosiasikan pengalamannya dengan pemberdayaan saat berkonflik dengan aktor negara. Mereka menemukan bahwa partisipan protes memahami pemberdayaan itu secara berbeda-beda sehingga muncul beragam tujuan dan terjadi perpecahan dalam gerakan itu.

Apa yang studi-studi sebelum tunjukkan adalah interaksi gerakan dan tatanan politik dapat menghasilkan konflik yang pada gilirannya mengubah identitas kolektif gerakan. Studi ini pada khususnya berfokus pada bagaimana pengoperasian kuasa dalam tingkat interaksional membentuk identitas kolektif.

Sejumlah studi telah menunjukkan identitas sebagai alat gerakan untuk mendukung kesuksesannya dan menyerang oposisi (misalnya MacGregor, 2019; Molek-Kozakowska dan Wanke, 2019; Shriver dan Adams, 2013), dan ambil bagian dalam mekanisme represi (misalnya Boykoff, 2007; Linden dan Klandermans, 2006). Molek-Kozakowska dan Wanke (2019) menjelajahi perdebatan dalam jaringan tentang hukum aborsi di Polandia pada akhir 2016. Perdebatan ini terjadi di antara dua gerakan: koalisi *Stop Abortion* dan komite *Save Women*. Mereka menunjukkan bagaimana pemanggilan nama dialamatkan untuk mendiskredit lawan debat. Boykoff (2007) mempelajari represi negara pada beberapa kasus kontensi di Amerika Serikat yang melibatkan komunis, Partai Kumbang Hitam, Gerakan Indian Amerika, dan Gerakan Keadilan Global. Dia mendemonstrasikan stigmatisasi sebagai bagian dari sebuah mekanisme sosial yang dapat membangkitkan represi negara.

Keseluruhan studi itu menunjukkan bahwa identitas dapat menjadi instrumen politik dan oleh karenanya juga dapat digunakan untuk membentuk, mempertahankan, bahkan mengakhiri tindakan kolektif. Meski demikian, kebanyakan studi tidak memberikan perhatian khusus pada stigma sebagai suatu cara pengoperasian kuasa yang digunakan oleh oposisi gerakan yang secara langsung menasar identitas gerakan. Studi ini berharap dapat menjembatani celah yang ada dalam literatur formasi identitas kolektif dengan cara menunjukkan peran stigma dalam pengonstruksian identitas.

Pada beberapa tahun terakhir, upaya untuk mengungkapkan fungsi politik dari stigma telah dilakukan sebagai respon atas kecenderungan kajian mikro dalam topik ini. Popularitas kajian stigma dapat dilacak sejak Erving Goffman menyelesaikan salah satu buku monumentalnya, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, di mana stigma mengalami pertumbuhan jumlah yang hebat dari tahun ke tahun (Pescosolido dan Martin, 2015). Namun, banyak di antara penelitian itu hanya memfokuskan perhatian pada proses-proses yang sangat individualistik. Sebagai konsekuensi atas kecenderungan ini, studi-studi yang mengobservasi pemaknaan stigma secara lebih luas, yaitu dengan cara menautkannya pada struktur

sosial, justru termarginalisasi. Kondisi inilah yang mendorong para sosiolog untuk mengembalikan konsep stigma dari perspektif sosiologi secara distingtif melalui pembacaan ekonomi politik dan kultural (Tyler dan Slater, 2018).

### 1.4.3 Konsep Stigma dan Perkembangannya

Stigma bukanlah entitas yang singular, fenomenon yang statik, atau pun sekedar pengalaman sosial, melainkan memiliki makna ganda dan saling berkontestasi (Pescosolido dan Martin, 2015). Tidak mengejutkan kalau terjadi kekacauan definisi pada penelitian yang ada. Misalnya, Stafford dan Scott (1986) mengajukan bahwa stigma adalah sebuah karakteristik dari orang-orang yang bertentangan dengan sebuah norma dari sebuah unit sosial. Crocker et al (1998) mengindikasikan bahwa orang-orang yang distigmatisasi “memiliki (atau dipercaya memiliki) beberapa atribusi, atau karakteristik, yang *conveys* sebuah identitas sosial yang *devalued* dalam konteks sosial tertentu”. Sedangkan itu, Jones et al (1984) mengajukan stigma sebagai hubungan antara atribut dan stereotip sehingga stigma merupakan tanda (*mark*—dengan kata lain merupakan atribut) yang menautkan pembawanya pada karakteristik yang tidak dikehendaki (stereotipe). Ketiganya memberikan penekanan pada hal yang berbeda dalam mendefinisikan stigma; yang pertama dan kedua memusatkan perhatiannya pada norma dan konteks, sedangkan yang ketiga secara spesifik menautkan karakteristik dengan stereotip.

Bagaimanapun juga, nampaknya bijaksana apabila kita kembali melihat catatan Goffman agar dapat memahami konsep stigma, sebagaimana dia yang memberikan pondasi dasar dari keseluruhan badan kajian stigma. Dalam hal ini, Goffman (1963) membuat empat klaim: pertama, stigma merupakan sebuah perspektif yang dihasilkan dalam suatu konteks sosial; kedua, manajemen identitas digunakan oleh orang-orang yang distigma untuk menangani efek buruk dari stigma; ketiga, secara lebih eksplisit (Tyler dan Slater, 2018), stigmatisasi memiliki wujud yang spesifik secara historis; dan terakhir, stigma berfungsi sebagai sebuah cara untuk melakukan kontrol sosial formal. Klaim pertama dan kedua mendominasi penelitian, pembuatan kebijakan, dan gerakan anti-stigma.

Kebanyakan studi yang mengeksplisitkan definisi stigma mengacu pada Goffman (1963) yang memahami stigma sebagai sebuah atribusi yang sangat mendiskredikan pembawanya. Atribusi ini merendahkan pembawanya dari manusia yang utuh ke manusia yang ternodai dan tidak diinginkan. Stigma memberikan “tanda” yang membedakan pembawanya dari yang bukan pembawanya yang berguna sebagai simbol penolakan sosial. Goffman (1963) mengidentifikasi tiga jenis stigma: kecacatan fisik; karakter yang cacat (berdasarkan tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang); dan stigma tribal. Menurut Goffman, stigmatisasi terjadi ketika individu tidak sesuai dengan apa yang dianggap sebagai ‘normal’ lalu masyarakat menilainya sebagai penyimpangan.

Di lain hal, historisitas dan fungsi kontrol dari stigma—yaitu klaim yang ketiga dan keempat—cenderung diabaikan, bahkan oleh Goffman sendiri (Tyler, 2018) sehingga kajian-kajian yang mempelajari stigma sebagai suatu konstruksi sosial yang berdimensi politik termarginalisasi dalam literatur kontemporer. Peranan politik dalam stigmatisasi telah dideteksi oleh Bruce G. Link dan Jo Phelan (2001). Dalam konseptualisasi mereka, stigma awalnya diposisikan sebagai hubungan antara atribut dan stereotip, lalu hubungan keduanya diperluas agar makna lebih luas dapat ditangkap. Dengan cara itu, Link dan Phelan mengajukan bahwa stigma menjadi ada ketika *labeling*, *stereotyping*, *separasi*, *status loss*, dan *diskriminasi* bertautan sedemikian rupa dalam sebuah *power situation*. Tanpa adanya relasi kuasa, stigma tidak akan ada; kuasa adalah prasyarat dari stigmatisasi. Argumen-argumen yang mendukung konseptualisasi itu ada lima.

Pertama, konsep “label” lebih tepat daripada “tanda” maupun “atribut” dalam memahami stigma karena kategori pembedaan sosial merupakan hasil dari proses-proses sosial yang bervariasi secara ruang dan waktu. Penggunaan konsep “tanda” ataupun “atribut” berisiko mengaburkannya sebagai produk masyarakat.

Kedua, stereotip merupakan konsep penting dan selalu ada dalam stigma. Dalam kaitannya dengan label, masyarakat menghubungkan orang yang dilabeli

dengan karakteristik yang tak diinginkan (*undesirable characteristics*) secara sosial. Karakteristik inilah yang membentuk stereotip negatif.

Ketiga, kombinasi antara label dan stereotip memberikan pondasi bagi pemahaman masyarakat bahwa yang dilabeli berbeda secara fundamental dari yang tidak dilabeli. Dengan kata lain, konsep separasi penting untuk memahami bagaimana kelompok yang distigmatisasi dipisahkan dari yang bukan.

Keempat, sikap-sikap itu mengantarkan kelompok yang dominan untuk mengadopsi perilaku diskriminatif kepada yang distigmatisasi. Perilaku ini mengakibatkan hilangnya status pada kelompok yang distigma sehingga mereka diposisikan secara tidak adil dalam banyak kelompok. Dalam kerangka yang lebih luas, praktik diskriminasi dan hilangnya status sosial ini menyebabkan ketidaksetaraan sosial.

Kelima, hubungan antara kelompok yang dominan dan yang distigmatisasi tidak setara. Itu menandakan bahwa terdapat kuasa yang beroperasi dalam stigma untuk mendirikan dan mempertahankan dominasi kelompok; sederhananya, stigma dependen pada kuasa.

Catatan Link dan Phelan (2001) sangat penting bagi masa depan studi stigma karena, selain mampu menunjukkan kompleksitasnya, mereka juga mempermasalahkan pengabaian pada konsep kuasa dalam literatur stigma. Menurut mereka, peranan kuasa dalam stigma seringkali tidak kelihatan karena kuasa tidak dipermasalahkan dan diterima begitu saja. Merespon hal itu, kuasa diadvokasikan dalam konseptualisasi stigma. Sejak saat itulah kuasa dianggap menjadi elemen konstitutif yang penting dalam mempelajari stigma<sup>3</sup>. Telah diajukan bagaimana stigmatisasi berperan secara politis (Phelan, Link, dan Dovidio, 2008). Paling tidak ada tiga fungsi: pertama, stigmatisasi menjaga eksploitasi dan dominasi sehingga ketidaksetaraan terus berlangsung (*keeping people down*); kedua, memaksakan

---

<sup>3</sup> Nampaknya tidak semua akademisi memahami sebagaimana yang Link dan Phelan (2001) pahami bahwa stigma terjadi karena ada relasi kuasa. Hal ini bisa dilihat dari pekerjaan Bos et al (2012) yang hanya mengikutsertakan kuasa dalam stigma struktural, salah satu jenis stigma yang berdimensi institusional dan ideologis.

orang-orang untuk mengikuti norma sosial yang berlaku (*keeping people in*); dan ketiga, fungsi eksklusi, menjauhkan orang-orang dari kelompok yang distigmatisasi (*keeping people away*).

Elaborasi yang secara eksplisit menghubungkan stigma dan politik datang dari pekerjaan Link dan Phelan (2014). Berangkat dari konsep Bourdieu (1987), kuasa simbolik, mereka membangun satu konsep baru yang disebut *stigma power* (kuasa stigma). Kuasa stigma dapat didefinisikan sebagai “*the capacity to keep people down, in and/or away by using stigma-related processes*” (Link dan Phelan, 2014). Konsep ini memahami bahwa stigma digunakan oleh *stigmatizers* untuk mempertahankan ketidaksetaraan, memaksakan norma sosial yang dominan, atau memisahkan pembawa stigma dari yang bukan—dengan kata lain *to keep people down, in, or away*.

Kuasa simbolik penting dalam konseptualisasi kuasa stigma untuk tiga hal. Pertama, kuasa simbolik mengajukan bahwa distingsi nilai (*value*) dan keberhargaan (*worth*) sangatlah penting mekanisme pengoperasian kuasa. Pemahaman semacam itu mengimplikasikan bahwa stigmatisasi merupakan bentuk kuasa simbolik. Kedua, mereka yang berhadapan dengan kuasa simbolik seringkali dipengaruhi untuk menerima penilaian komunitasnya dan statusnya yang rendah dalam hierarki sosial. Dalam kaitannya dengan stigma, hal itu sesuai dengan ide penginternalisasian diri dalam stigma (Corrigan dan Watson, 2002). Terakhir, pengoperasian kuasa simbolik seringkali diterima begitu saja sehingga tersembunyi atau “tak dikenali” oleh pelakunya maupun korbannya. Misrekognisi ini juga terjadi di dalam fenomena stigma.

Bersamaan dengan dibuatnya konsep kuasa stigma, muncul kesadaran bahwa cakupan teoritik stigma perlu diperluas dan ditujukan pada struktur dan kuasa tingkatan meso dan makro. Sekalipun studi-studi kemudian mengadopsi kuasa dalam mempelajari stigma, terbatasnya lensa teoritik kuasa yang digunakan akan memproduksi temuan studi yang sempit sehingga muncul kebutuhan di

kalangan sosiolog untuk mengembangkan konsep kuasa stigma (lihat Tyler dan Slater, 2018).

## 1.5 Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi *grounded theory* klasik atau Glaserian karena lebih mampu mengungkapkan pola perilaku yang senyatanya terjadi di area substantif studi ini daripada metode kualitatif dan kuantitatif. Saya mengumpulkan data studi ini dengan wawancara dan observasi digital. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis melalui dua tahap: analisis terbuka dan analisis selektif.

### 1.5.1 Metodologi *Grounded Theory*

Studi ini mengikuti rancangan *grounded theory*. Namun penting untuk diperjelas *grounded theory* yang mana yang digunakan, sebab ia sesungguhnya terdiri dari beberapa metode yang berbeda secara asumsi dan penerapan. Terdapat empat jenis *grounded theory*: Glaserian, Straussian, Konstruktivis, dan Clarkian (Arpaiman, 2016).

Fase awal studi ini dilakukan dengan *grounded theory* konstruktivis (selanjutnya disingkat GTK). Penggunaannya didasarkan kepada kesesuaian perspektif ilmu sosial yang saya anut pada saat itu, yaitu konstruktivisme. Dalam penerapannya, di satu sisi, GTK tidak menyajikan suatu kerangka metode yang terang. Kathy Charmaz (2006) tidak memberikan gambaran yang jelas pada bagaimana data dikode secara terfokus (*focused coding*). Selain itu, Charmaz juga tidak memberikan rincian pada cara menyatukan dan mengonseptualisasikan kode-kode di dalam fase *memo writing*. Dia hanya menyediakan kerangka berpikir dalam menulis memo, bukan mengonseptualisasikan tiap segmen data yang dikode sebelumnya. Buku panduan awal GTK kurang lengkap untuk diadopsi oleh peneliti baru

Di sisi lain, kondisi partisipan dan peneliti pada masa awal studi tidak memungkinkan riset berperspektif konstruktivis berjalan dengan lancar. Pertama, partisipan sangat berhati-hati pada peneliti, siapapun itu. Bagi mereka, peneliti serupa dengan imperialis; mereka datang hanya untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk mengekstrak data dan tidak ada untungnya untuk orang-orang Papua. Jadi, partisipan ditentukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua, bukan bebas dipilih oleh studi ini. Kondisi lainnya terkait partisipan adalah mereka tidak begitu tau pengalaman-pengalaman terkait penolakan sosial dan politik di tahun-tahun sebelumnya. Meminta mereka berbicara, misalnya, kejadian tak mengenakan pada tahun 2018 adalah perbuatan yang sia-sia karena mereka takkan ingat.

Peneliti lalu merasa terhalangi oleh batasan metode dan partisipan. Sekitar akhir tahun 2020, saya putuskan untuk meninjau ulang studi ini dari asumsi metodologisnya. Saya membandingkan GTK dengan *grounded theory* Glaserian (selanjutnya disingkat GTG). Sekurang-kurangnya, ada dua sebab yang membuat studi ini mengubah rancangannya dari GTK ke GTG.

Pertama, panduan GTG lebih dapat diakses daripada GTK. Studi ini dipandu oleh tiga jenis panduan GTG: buku berjudul *Classic Grounded Theory: Applications With Qualitative and Quantitative Data* (Holton dan Walsh, 2016), jurnal internasional *The Grounded Theory Review*, dan program *mentorship* oleh Barry Chametzky. Ketiga panduan ini memiliki informasi yang lengkap atas apa yang semestinya pengguna GTG lakukan dan hindari.

Kedua, GTG lebih *grounded* daripada GTK sebagaimana yang pertama menghindari deskripsi tebal sedangkan yang akhir mendukung kekayaan data. Dalam GTK, Charmaz mengadvokasikan penelitian yang melonggarkan semangat meraih obyektivitas, dan menerima ko-konstruksi yang terjadi di antara peneliti dan partisipan. Sebagai konsekuensinya, *grounded theory* yang dimodifikasinya itu lebih mengutamakan deskripsi yang mendalam dan rinci, bukannya konseptualisasi yang memiliki jangkauan luas, lepas dari ruang dan waktu studi. Sedangkan dalam GTG, hal sebaliknya terjadi. Pengguna GTG tidak diperbolehkan atau sebisa

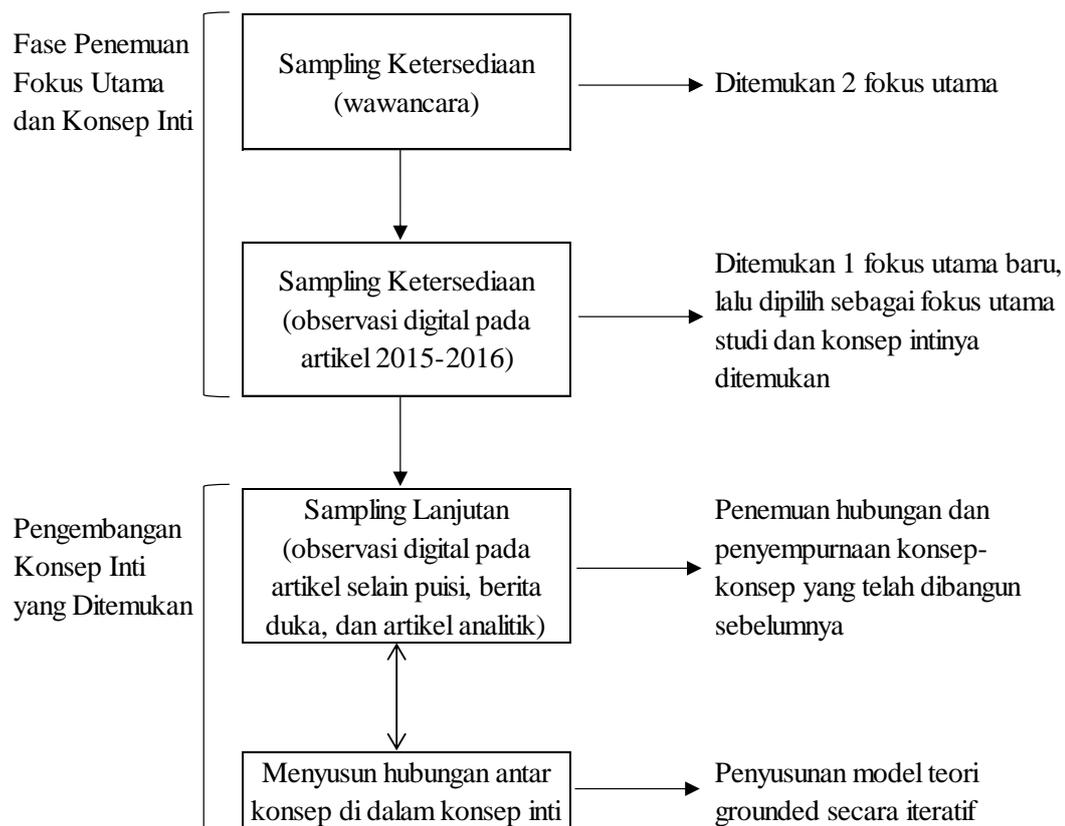
mungkin harus menahan segala asumsi tentang bagaimana dunia ini bekerja. Bagi Barney Glaser (Glaser dan Tarozzi, 2007), dunia yang dihadapi oleh peneliti hanyalah dunia empirik yang dicerapi oleh indera. Tugas peneliti adalah menangkap, mengomparasikan, dan mengabstraksikan data inderawi itu tanpa tercemari oleh kepentingan dan kerangka berpikir apapun.

Nalar *groundedness* dari GTG juga dapat ditemukan pada asumsinya atas data: *All is Data* (Glaser, 2007). Dalam diktum itu, peneliti GTG harus memahami bahwa apapun yang ada di area studi sebagai data, dan menerima semua jenis data baik itu data kuantitatif maupun kualitatif. Berbeda dari metodologi di ilmu sosial secara umum yang memisahkan riset kuantitatif dan kualitatif, GTG mengasumsikan bahwa semua jenis data sama pentingnya untuk menemukan teori. Perhatian para pengguna GTG bukan lagi pada perbedaan data kualitatif dan kuantitatif tapi pada faktualitas data. Sekurang-kurangnya Glaser mengidentifikasi empat jenis data: *baseline data* di mana partisipan mengungkapkan data apa adanya, *interpretative data* di mana partisipan menginterpretasi suatu kejadian berdasarkan sebuah sudut pandang, data tersaring di mana partisipan menyampaikan apa yang mereka rasa perlu dan menutupi apa yang dirasa tak perlu untuk disampaikan, dan *vague data* di mana partisipan menutupi dan menghindari jawaban yang sesungguhnya.

Dalam GTK, data yang diincar adalah data yang kaya dengan makna. Peneliti harus menjelajahi pengalaman para partisipan untuk mengungkapkan asumsi dan makna tersembunyi yang ada di data. Jenis data kualitatif menjadi andalan dalam studi ini, sedangkan data kuantitatif tidak ada banyak nilai gunanya karena data kuantitatif tak memuat informasi yang pengguna GTK inginkan. Dengan cara ini, GTK membatasi dirinya dalam berteorisasi.

GTG lebih mampu berteorisasi dari data dengan asumsi yang sedikit sehingga ia lebih sesuai dengan tujuan studi ini daripada GTK. Studi ini oleh karenanya mengadopsi GTG sebagai metodologi. Namun, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian limitasi, studi ini tidak menggunakan GTG secara penuh

untuk beberapa alasan. Satu alasan yang paling penting adalah peneliti belum memiliki pengalaman dan pelatihan yang memadai untuk mampu menggunakan GTG secara tepat. Studi ini juga memodifikasi GTG berdasarkan batasan sumber daya yang dimiliki peneliti. Rancangan dari studi ini mengadopsi rancangannya GTG. Bagan di bawah menggambarkan rancangan penelitian dari studi ini.



Gambar 1.1 Rancangan Studi

### 1.5.2 Sumber Data dan Teknik Sampling

Gerakan Papua merdeka membawa ide yang ditolak oleh masyarakat secara umum, dan, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, penolakan itu dapat mengonsekuensikan kekerasan fisik. Oleh sebab itu, sebagian kelompok yang terlibat dalam gerakan ini merahasiakan keberadaannya dan bergerak secara

anonim. Kelompok ini di antaranya adalah aktivis anarko-sindikalisme, sosialisme, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Bagaimanapun juga mereka adalah kelompok yang memiliki tujuan yang lebih besar dibandingkan dengan kemerdekaan Papua Barat, sehingga tidak semua berpartisipasi secara rutin dalam gerakan Papua merdeka. Selain kelompok anonim, gerakan ini juga terdiri dari kelompok yang sudah cukup dikenal oleh publik melalui media massa, misalnya Aliansi Mahasiswa Papua, Forum Rakyat Indonesia untuk West Papua, dan, dalam bentuk yang lebih besar, *United Liberation Movement for West Papua*. Meski demikian, aktivis dalam kelompok ini sulit direkrut karena stigmatisasi separatis mengharuskan mereka menjadi sangat selektif dan berhati-hati dalam membagikan informasi sensitif mengenai gerakan Papua merdeka.

Para aktivis dapat dikategorikan ke dalam tiga tujuan partisipasi dalam tindakan kolektif: pertama, untuk kemerdekaan Papua Barat; kedua, sebagai komitmen dan untuk memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial; terakhir, sebagai upaya menegakkan HAM. Karena studi ini mempelajari gerakan Papua merdeka, maka partisipan yang direkrut paling tidak memenuhi dua kriteria berikut: (1) menjadi anggota Aliansi Mahasiswa Papua dan (2) memiliki peran strategis di organisasi tersebut.

Partisipan dalam studi ini tidak mudah untuk membuka informasi internal organisasi pada orang luar, apalagi pada peneliti akademik. Kedatangan saya sebagai mahasiswa yang hendak meneliti sudah mengganggu rutinitas mereka, karena kegiatan meneliti dianggap serupa dengan kegiatan imperialis. Dalam pengalaman mereka, para peneliti hanya datang untuk mengekstrak data, dan menggunakannya untuk kepentingan peneliti saja. Partisipan hanya diam dan tak diuntungkan. Iklim semacam ini tidak memungkinkan saya untuk bebas memilih partisipan, apalagi bebas masuk ke dalam pengalaman mereka. Partisipan yang saya pilih tentu merupakan anggota Aliansi Mahasiswa Papua. Akan tetapi saya tak bisa memilihnya sendiri; mereka menyediakan siapa saja yang bisa saya wawancarai. Jadi, meski saya memiliki kriteria *sampling* yang sedemikian rupa, studi ini mendapatkan partisipan berdasarkan ketersediaan (*convenience sampling*).

Partisipan yang bersedia tidak memiliki memori yang lengkap atas peristiwa-peristiwa yang dialami organisasi di masa lalu. Oleh karenanya, studi ini juga mengumpulkan data dari publikasi organisasi yang diunggah di internet. Dibandingkan wawancara, internet jauh lebih kaya data dan karena itu juga sebagian besar data studi ini didapat dari internet.

Aliansi Mahasiswa Papua menggunakan beberapa jenis media: Facebook, Instagram, Blogspot, YouTube dan Twitter. Studi ini menggunakan satu sumber data saja: Instagram dan Blogspot. Untuk mendapatkan data yang kaya peristiwa, berurutan dan rinci, studi ini mengumpulkan data dari Blogspot. Sedangkan sumber data lainnya tidak digunakan karena keterbatasan sumber waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh peneliti.

Media dalam jaringan dipilih sebagai sumber data lanjutan karena data yang diberikan oleh partisipan kurang kaya peristiwa, sebagaimana mereka terbatas pada memori dan lama partisipasi di organisasi ini, dan tidak cocoknya aktivitas riset dengan sudut pandang mereka sebagai aktivis mahasiswa Papua. Penggunaan media dalam jaringan tidak hanya memperkaya data studi ini, tetapi juga membuka akses peneliti ke peristiwa masa lalu yang tak bisa diungkapkan oleh partisipan.

Data blog diseleksi berdasarkan periodenya. Peneliti mengambil data periode 2015 di blog. Dari total 87 artikel blog yang diperoleh, 3 artikel ditambah ke dalam data karena bertautan erat dengan artikel lainnya yang telah dipublikasi di blog. Jadi, total artikel yang diobservasi oleh studi ini adalah 90 artikel.

Setelah peneliti memiliki *main concern* (fokus utama) dan *core category* (kategori atau variabel inti), fase pengumpulan data berikutnya adalah fase selektif. Pada fase ini, data diseleksi berdasarkan tiga konsep yang muncul dari analisis data, bukan berdasarkan kriteria *sampling* yang telah ditentukan di awal. Maka sejumlah artikel blog tidak diikuti sebagai data studi karena ia hanya memuat opini teoritik, puisi, dan kabar duka serta bahagia dari masing-masing anggota. Mereka tidak relevan dengan konsep-konsep dari manajemen relasi. Meski demikian, studi ini tidak mengklaim menggunakan *sampling* teoritik karena, sebagaimana yang

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

akan dibahas pada batasan studi, studi ini tidak mengadopsi GTG secara penuh dan melakukan sejumlah modifikasi yang berada di batasan GTG. Tabel berikut ini menyajikan data yang dilaporkan oleh studi ini.

Tabel 1.1 Sumber Data

No.	Metode	Sumber Data	Kode Data
1	Wawancara	ZC	ZC
2	Wawancara	Y	Y
3	Observasi	Foto-Foto Aksi Mengutuk Klaim Wilayah West Papua oleh Ir Sukarno, 19 Desember 2014 di Yogyakarta	FFA
4	Observasi	AMP: Trikora Embrio Konflik Papua	ATEK
5	Observasi	Kami Tuntut Kawan Mako Oktovianus Pekei dan Reporter www.tabloidjubi.com. Ernerts Pugiye Klarifikasi Berita	KTK
6	Observasi	Klarifikasi Berita Tentang Peringatan Trikora, 19 Desember 2014 di Jubi	KBTP
7	Observasi	Dialog Tidak Menyelesaikan Persoalan Papua	DTM
8	Observasi	AMP KOTA YOGYAKARTA TEGAS TOLAK PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB BARU DI WAMENA !!!	AKY
9	Observasi	Papua telah bersatu di bawah kelompok payung baru. 7 Desember 2014 Port Vila, Vanuatu.	PTB
10	Observasi	Foto Aksi Mahasiswa Papua Tuntut PT. Freeport dan Perusahaan Asing di Papua Tutup	FAM
11	Observasi	Foto Aksi AMP Tuntut Freeport dan Perusahaan Asing Ditutup	FAMT
12	Observasi	Tutup Freeport dan Seluruh Perusahaan asing, Dalang Kejahatan Kemanusiaan di Papua	TFS
13	Observasi	Peringati Biak Berdarah, AMP Komite Kota Bandung Lakukan Aksi Damai	PBBAK
14	Observasi	Kronologis Aksi Bakaran Lilin AMP KK-Yogyakarta Memperingati Tragedi Biak Berdarah 1998	KABLA
15	Observasi	Penguasa Adalah Musuh Kita	PAMK

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

16	Observasi	Samuel Nawipa dan Sisilius Pugiye diPulangkan Setelah DiInterogasi Dari Polda Metro Jaya Jakarta	SNSP
17	Observasi	AMP Nyatakan Sikap Atas Tindakan Represi dan Penangkapan Amona Nawipa	ANSAT
18	Observasi	AMP Memperingati Hari HUT ke 17 Secara Serentak	AMHH
19	Observasi	KP AMP: Surat Untuk Kawan-Kawan Di Hari Bahagia AMP	KASUK
20	Observasi	Memperingati Hari HUT AMP, KK Bogor Potong Kue Bintang Kejora	MHHAK
21	Observasi	AMP Salut Kepada FMJ-PTP dan Masyarakat Jayawijaya	ASKFM
22	Observasi	Suara Perempuan Papua: NKRI tidak bertanggungjawab atas Pepera 1969	SPPN
23	Observasi	46 TAHUN PEPERA TIDAK DEMOKRATIS, AMP JAKARTA KEMBALI TURUNG JALAN	46TPT
24	Observasi	Kemerdekaan Bangsa Papua Merupakan Kewajiban Hukum Negara Indonesia	KBPM
25	Observasi	Undangan Seminar; AMP Jogja Memperingati 43 Tahun Mambesak	USAJM
26	Observasi	Tantangan Budaya Terhadap Tiga Musuh Rakyat Papua	TBTM
27	Observasi	“Mencari Bumiku Yang Dihilangkan”	MBYD
28	Observasi	Aksi AMP Jogja Gelar dalam Kepungan Brimob	AAJGK
29	Observasi	KK Malang – Surabaya Aksi Demo Damai; Perjanjian New York Ilegal	KMSAD
30	Observasi	KK Yogyakarta Gelar Pendidikan Politik	KYGPP
31	Observasi	Selamat HUT GKI ke-59	SHG
32	Observasi	Bersatu Wujudkan Cita-cita Pembebasan Nasional Bangsa Papua	BWCPN
33	Observasi	Kronologis Aksi 1 Desember 2015 di Bundaran HI	KADBH

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Fase awal dalam studi ini adalah fase terbuka, dan peneliti menjelajahi apapun pengalaman partisipan. Tujuan dari fase awal adalah menemukan pola-pola perilaku yang ada di area studi yang kemudian dipilih untuk menjadi fokus studi. Pada fase ini saya menggunakan wawancara mendalam untuk menemukan pola perilaku yang kemudian difokuskan pada fase kedua, yaitu fase selektif. Tujuan dari fase kedua adalah untuk menemukan bagaimana pola perilaku bekerja. Pada fase inilah observasi digital digunakan.

Wawancara pertama dan kedua dari studi ini dilakukan dalam bingkai GTK (paradigma konstruktivisme) dalam bentuk wawancara semi-terstruktur. Wawancaranya direkam dalam rentang waktu satu jam. Setiap wawancara diawali dengan perbincangan umum, seperti “Ceritakan pada saya tentang Aliansi Mahasiswa Papua” dan “Kenapa ada Aliansi Mahasiswa Papua?”. Beberapa pertanyaan berikutnya menjelajahi pengalaman partisipan dari berbagai *setting*: keluarga, pertemanan, perkuliahan, organisasi eksternal, dan sebagainya. Meski demikian, peneliti tetap mampu menjelajahi subyektivitas dan pengalaman mendalam dari para partisipan tanpa terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Proses wawancara sangat memperhatikan subyektivitas peneliti-partisipan, situasi yang berlangsung, makna implisit dan aturan tersembunyi (*tacit rules*) yang dimiliki oleh partisipan untuk mendapatkan data yang kaya (*rich data*) (Charmaz, 2006).

Setelah berganti metodologi ke GTG, wawancara mendalam yang telah dilakukan didengarkan kembali untuk dilakukan pencatatan data. Dalam GTG, rincian dan spesifisitas tidak menjadi perhatian utama peneliti sehingga wawancara semestinya tidak direkam tapi dicatat bagian-bagian yang dirasa penting saja (Glaser, 2007). Jadi, pencatatan harus terjadi pada setiap proses pengumpulan data; ada jarak antara subyek atau obyek penelitian dan peneliti.

Saya mendengarkan kembali kedua wawancara yang telah dilakukan dan membuat catatan-catatan dari setiap bagiannya. Tidak semua ungkapan partisipan

penting untuk dicatat. Satu kriteria untuk menentukan apakah pernyataan perlu atau tidak perlu untuk dicatat adalah bahwa pernyataan itu mengungkapkan pengalaman partisipan saat mempertimbangkan diri dan saat sudah menjadi anggota Aliansi Mahasiswa Papua. Ungkapan lain di luarnya dianggap tidak relevan dengan minat studi ini sehingga tidak dicatat.

Penggunaan wawancara dalam studi ini kurang efektif dalam tugas mengumpulkan data. Sebab, para partisipan sangat sulit untuk dijangkau. Mereka mengasumsikan peneliti sebagai orang yang serupa dengan imperialis; hanya datang untuk mengekstrak data bagi dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Label imperialis sangat penting di sini untuk menandai bahwa akses peneliti pada subyektivitas tiap individu sangatlah terbatas dan wawancara tidak dapat dilakukan dengan jangkauan yang luas di studi ini. Observasi pada blogspot Aliansi Mahasiswa Papua dipilih sebagai cara pengumpulan data berikutnya.

Teknik observasi yang digunakan tidak mengacu pada satu teknik manapun yang ada di literatur. Misalnya, teknik observasi partisipan yang biasanya ada di etnografi. Melainkan, studi ini menrancangkan sendiri teknik observasi digitalnya sesuai dengan jenis sumber datanya. Tujuannya adalah agar data dikumpulkan tidak *overwhelming* dengan deskripsi, konsisten dengan metodologi GTG, sekaligus tetap melihat semua bagian sebagai data secara cermat, konsisten dengan prinsip *All is Data*.

Rancangan teknik observasi yang digunakan dalam studi ini peneliti sebut sebagai observasi *multilevel*. Peneliti mengobservasi isi tulisan sehingga perilaku dan sikap sosial dapat diungkap. Konteks tulisan dalam serangkaian peristiwa juga diobservasi dengan cara mengkoneksikan sebuah teks yang diamati dengan peristiwa dan teks lainnya. Fungsi tulisan bagi organisasi juga diamati. Teknik observasi ini didasarkan kepada sifat dari media dalam jaringan yang juga terdiri dari beberapa lapisan informasi. Dengan begitu, pengumpulan data jadi lebih kaya karena berbagai tingkatan data berhasil dikumpulkan.

#### 1.5.4 Metode Analisis

Semula, semua data dikode berdasarkan kepada nalar GTK yang terdiri dari dua jenis pengkodean: *initial coding* dan *focused coding*. Peneliti mengkode dengan menggunakan perangkat lunak bernama ATLAS.ti versi ke-7. Selaras dengan asumsi konstruktivisme, koding awal dilakukan secara baris per baris untuk mengonstruksi kode yang, secara tekstual, mendekati dan mewakili ungkapan data. Metode analisis semacam ini membuat proses pengkodean seperti melabeli setiap segmen data. Setelah kode-kode didapat, setiap kode dipadatkan ke dalam satu kategori atau kode (*focused coding*). Dengan cara ini, peneliti mendapatkan sejumlah konsep tanpa mengabaikan kode-kode lainnya yang mewakili suara partisipan (Charmaz, 2006). Seiring dengan proses pengkodean, peneliti menulis sejumlah catatan atas kode di memo. Penulisan memo pada fase awal ini penting untuk melihat proses sosial dan variasi yang ada di fenomena yang dipelajari.

Metode analisis GTK ini, sekurang-kurangnya, memiliki dua masalah. Pertama, sangat mudah bagi peneliti kewalahan atas banyaknya kode sehingga terjadi kebingungan dalam mengonseptualisasi data. Masalah ini masuk akal terjadi sebagaimana GTK juga mengejar deskripsi dalam proses pengkodean (dari *initial* ke *focused*). Kedua, GTK tidak menyajikan cara yang cukup jelas dalam menautkan semua analisis pada setiap data yang dikumpulkan. Masalah ini teratasi di GTG.

Studi ini, dalam rancangan GTG, terdiri dari dua fase. Pada fase pertama, peneliti terbuka dengan apapun temuan yang ada di area studi. Karena harus terbuka, peneliti perlu mengkode apapun yang relevan dalam area studi dan menerima isu apapun yang dianggap penting oleh data. Teknik pengkodean ini disebut sebagai *open coding*.

Setiap catatan dikode secara kalimat per kalimat. Kontras dari GTK, *open coding* berfokus pada indikator dari data. Setiap pengkodean yang dilakukan, saya bertanya pada diri saya apa yang kalimat ini indikasikan; kode adalah konseptualisasi atas insiden yang ada di data, dan peneliti harus mencari apa yang potongan data indikasikan (Holton dan Walsh, 2016). Panjang kode sekitar satu

hingga dua kata saja dalam bentuk *gerund*, dan dilakukan dengan bahasa Inggris (Chametzky, 2016a). Penggunaan bahasa Inggris penting karena kosa katanya lebih kaya dalam menangkap insiden pada data yang dimiliki oleh peneliti.

Proses pengkodean tidak dilakukan dengan perangkat lunak yang secara khusus ditujukan untuk analisis data kualitatif sebagaimana cara itu dianggap membatasi proses GTG, khususnya proses antara pengkodean, penulisan memo, dan komparasi konstan. Karena itu setiap kode, alih-alih menggunakan ATLAS.ti, divisualisasikan di Google Sheet untuk melacak setiap penambahan dan perubahan konseptual. Saya juga menggunakan buku sketsa sebagai memo dan tempat pencatatan data. Cara ini memfasilitasi studi ini untuk berpikir bebas dan terbuka pada setiap kode dan konsep yang muncul dari data. Jadi, saya *pergi-ke-sana-dan-ke-mari* di antara laptop dan buku sketsa.

Komparasi dilakukan secara konstan selama proses pengkodean dan proses penulisan memo. Setiap kode baru dikomparasikan dengan kode-kode yang ada sebelumnya untuk menemukan konsep baru, hubungan antarkonsep (Chametzky, 2016a), dan penyempurnaan konseptualisasi. Setiap perubahan dan pembaruan konseptual dicatat dalam memo.

GTG adalah metodologi yang sangat iteratif, non-sekuensial, dan repetitif (Chametzky, 2016b). Peneliti tidak bergerak secara kaku dalam analisis data karena momen penemuan konseptual memerlukan pemikiran yang tidak sedikit dan pengunjungan kembali ke data, kode dan catatan memo sebelumnya. Misalnya, peneliti perlu membaca ulang data, kode dan memo untuk menemukan label yang paling “tepat” pada ide konseptual yang ditemukan di data.

Kode adalah konseptualisasi deskriptif dari sebuah segmen data (Holton dan Walsh, 2016). Tujuan dari GTG adalah menemukan teori berdasarkan pola perilaku yang ada di area substantif, dan kode adalah langkah paling awal untuk menemukan teori *grounded*. Seiring kode dilabelkan, saling dibandingkan, dan ditemukan hubungannya, peneliti menemukan konseptualisasi yang lebih abstrak berdasarkan

data yang ada. Konseptualisasi ini disebut sebagai konsep, variabel, atau kategori<sup>4</sup>. Sebagian kode menjadi bagian dari konsep.

Pengkodean, komparasi, dan penulisan memo pada fase awal ini ditujukan untuk menemukan pola perilaku yang ada di data. Menurut Glaser (1978) pertanyaan-pertanyaan berikut ini membantu penemuan konseptual sepanjang analisis dilakukan: (1) Data ini tentang studi apa? (2) Kategori apa yang insiden ini indikasikan? (3) Apa yang sebenarnya terjadi di data? (4) Isu apa yang dihadapi oleh para partisipan? (5) Apa fokus utama mereka dan bagaimana mereka mememanajemen atau memecahkannya?

Setelah variabel atau konsep bermunculan, pola perilaku yang ada di area studi ditemukan. Pola perilaku dalam GTG diwakili oleh dua konsep yang muncul dari data: variabel inti dan fokus utama (Holton dan Walsh, 2016). Dalam hal ini, variabel inti adalah resolusi yang partisipan lakukan untuk menyelesaikan fokus utama mereka. Fokus para partisipan sesungguhnya lebih dari satu fokus, namun peneliti harus memilih mana fokus yang dipelajari.

Penemuan variabel inti dan fokus utama studi menandai berakhirnya fase pertama. Analisis, kemudian, menjadi selektif sesuai variabel inti dan fokus utama partisipan. Fase kedua dimulai: peneliti mengumpulkan dan menganalisis data secara selektif (*sampling* teoretis) untuk menemukan pola perilaku pada area substantif secara utuh. Perlu dicatat, studi ini tidak menerapkan GTG secara utuh, sehingga fase kedua tidak dilakukan dengan penuh. Peneliti membatasi pengumpulan data berdasarkan rentang tahun, bukannya saturasi teoritik; *sampling* teoritik tidak dilakukan sesuai kaidah dalam GTG. Peneliti juga membatasi analisis pada tiga variabel awal yang ditemukan. Hasil analisis tidak melalui tahapan yang lebih lanjut dalam GTG seperti pengkodean teoritik dan penulisan teori (Glaser, 2020).

---

<sup>4</sup> Para peneliti GTG menggunakan istilah konsep, variabel, dan kategori dalam arti yang relatif sama. Ketiga istilah itu penggunaannya juga disalingtukarkan dalam studi ini.

## 1.6 Batasan Studi dan Kriteria *Grounded Theory*

Pengaplikasian GTG dalam studi ini tidak penuh. Oleh karenanya, studi ini tidak menghasilkan *grounded theory*. Studi ini juga mengelola kembali proses dan data penelitian dari rancangan studi GTK sehingga ada beberapa hal yang tak sesuai kaidah GTG.

Pertama, studi ini mengawali dirinya dengan tinjauan literatur secara ekstensif di studi gerakan sosial dan studi stigma. Peneliti juga membiarkan dirinya untuk tersensitasi dengan konsep-konsep identitas kolektif, stigma, dan penyimpangan politik. Akibatnya, abstraksi berdasarkan GTG dalam studi ini sulit dilakukan dan terhalangi oleh “polusi” konseptual yang dimiliki peneliti. Ketika kesulitan ini dihadapi, peneliti menghentikan proses analisis, membaca kembali datanya, menahan diri untuk mengonseptualisasi. Di waktu berikutnya, konseptualisasi yang lebih bebas dari kerangka teoritik bisa dilakukan.

Kedua, studi ini melakukan wawancara semi-struktur untuk mengumpulkan data pada fase pertama (*open coding*). Dalam GTG, peneliti harus memulai pengumpulan datanya secara yang sangat terbuka. Kalau studinya mengandalkan wawancara, maka proses wawancara harus diawali dengan *grand tour questions* atau *spill questions* (Alvita, 2020). Pada praktiknya, studi ini membawa sejumlah pertanyaan terbuka yang diasumsikan pada literatur stigma: bahwa stigma pasti berdampak pada berbagai area kehidupan sosial para partisipan. Artinya, peneliti memiliki prakonsepsi yang membingkai pengumpulan data. Hal ini dapat membatasi peneliti dalam menemukan variabel-variabel yang lebih utuh.

Ketiga, fase kedua (*selective coding*) dilakukan terlalu awal. Batasan sumber daya (waktu dan finansial) menyebabkan proses pengumpulan data menjadi terbatas juga. Penganalisisan data pada fase kedua pun dibatasi oleh tiga variabel saja. Akibatnya, data yang diperoleh studi ini asimetris: ada variabel kekurangan data partisipan, dan ada variabel yang kaya data. Jadi, hasil analisis studi ini tidak bisa menggambarkan secara penuh bagaimana variabel inti menjelaskan fokus utama partisipan.

Secara keseluruhan, studi ini adalah satu bentuk remodel dari *grounded theory* versi pertama. Peneliti mengadopsi sebagian ajaran dalam GTG dan menerapkannya sesuai dengan ketersediaan waktu dan pendanaan. Hasil dari studi ini tidak lebih dari eksplorasi atas kebertahanan organisasi gerakan sosial. Agar lebih terukur, peneliti telah membuat kriteria studi GTG yang bagus. Kriteria dalam table di bawah ini diadaptasikan dari kriteria tinjauan artikel di jurnal *Grounded Theory Review* (Nathaniel, 2020).

*Tabel 1.2 Kriteria Studi Grounded Theory*

<b>Fase Riset</b>	<b>Kriteria GTG</b>	<b>Pemenuhan Kriteria</b>
Persiapan Peneliti	Peneliti familiar dengan area substantif studinya dan memiliki keingintahuan yang tidak bias	Peneliti familiar dengan Aliansi Mahasiswa Papua sebagaimana dirinya menjadi anggota di organisasi yang berafiliasi dengan aliansi tersebut
	Tidak membawa isu profesional, pertanyaan riset spesifik dan prasangka	Setelah beralih ke GTG, peneliti melepas konsep piaraan (yaitu, stigma, identitas kolektif dan kuasa), pertanyaan penelitian, dan prasangka atas hubungan stigma dan identitas kolektif
	Tidak menggunakan teori sebagai dasar studinya	Meski terdapat tinjauan pada konsep stigma dan identitas kolektif, studi ini mendasarkan dirinya pada wawancara pertama, kedua, dan observasi 10 data di blog
Pengumpulan Data	Sampel tidak kecil, dan deskripsi atas sampel disertakan	Terdiri dari 2 wawancara dan observasi artikel blog sepanjang tahun 2015
	Dilakukan dengan cara sangat terbuka	Wawancara awalnya dilakukan secara agak terbuka, sedangkan observasi blog dilakukan secara sangat terbuka

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

	Dikumpulkan melalui catatan lapangan	Wawancara yang direkam telah didengarkan ulang lalu dicatat, sedangkan artikel blog semuanya dicatat
	Sampling teoritik merevisi atau menambah pertanyaan wawancara sebagaimana teori mulai muncul	Studi ini tidak mengklaim telah melakukan sampling teoritik, tetapi melakukan sampling lanjutan setelah penemuan fokus utama dan konsep inti untuk mengembangkan model teori <i>grounded</i>
Penganalisisan Data	Penemuan fokus utama ( <i>main concern</i> ) dan variabel inti ( <i>core category</i> )	Partisipan memiliki sekurang-kurangnya tiga fokus utama, dan fokus utama terpilih telah ditemukan konsep intinya
	Dilakukan tanpa bantuan perangkat lunak analisis data	Peneliti menggunakan Google Sheet, buku sketsa, dan buku catatan untuk menganalisis data
	Memuat istilah-istilah khas <i>grounded theory</i> klasik: catatan lapangan, pengkodean, komparasi konstan, indikator konseptual, penulisan memo, hubungan antarkonsep, sampling teoritik, dan pengurutan memo.	Peneliti melakukan pencatatan, pengkodean, komparasi secara konstan, pembangunan konsep, dan penulisan memo. Sedangkan sampling teoritik, pengkodean teoritik (untuk menemukan hubungan antarkonsep) dan pengurutan memo tidak dilakukan.